

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kelas Lembaga Pendidikan ketrampilan Dan Pelatihan Kerja

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Kelas Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja** adalah ruang di mana pelajaran dari pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan yang keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- **Kelas** adalah ruangan, bangunan, atau wahana di mana pelajaran diajarkan; atau bisa juga merujuk yang artinya sekelompok murid/peserta yang menghadapi pelajaran tertentu di lembaga pendidikan.
- **Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja** adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan yang keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ? Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

RUMUS

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya kelas yang digunakan untuk lembaga pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja

INTERPRETASI

Semakin banyak kelas yang digunakan lembaga pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

KETERANGAN

SUMBER

Sensus Ekonomi 2016

METODOLOGI

- Metode listing usaha/Perusahaan:
Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah NKRI, mencakup seluruh usaha ekonomi.
- Metode Pendataan Karakteristik Usaha Mikro:
Pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing SE 2016.
- Metode Pendataan karakteristik Usaha Menengah Besa:
Dilakukan secara sensus untuk Seluruh usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DOKUMEN

SIPD

